



SKRIPSI

Judul:

Hak Upah Pekerja PKWTT Atas Tindakan
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan
Alasan Force Majeure (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/PDT.SUS-
PHI/2024/PN.MKS)

Disusun oleh:

FELIX FURGUSON
NIM. 205210023

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

HAK UPAH PEKERJA PKWTT ATAS TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA SECARA SEPIHAK DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR
15/PDT.SUS-PHI/2024/PN.MKS)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Felix Furguson
NIM : 205210023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama	:	FEU
NIM	:	205
Program Studi	:	HU
Judul Skripsi	:	Hal Huk Maj Ma
Title	:	Wa Wo Du Co

Skripsi ini telah dipertahankan
Fakultas Hukum Universitas

Persetujuan

Nama

NIM

Program Studi

Judul

Skripsi ini disetujui

ABSTRAK

Sebagai Negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai norma utama yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang salah satunya mengenai hak upah seorang pekerja. Upah bersifat esensial bagi pekerja mengingat pekerja telah meluangkan waktu dan tenaganya demi mencukupi kebutuhan hidupnya serta Negara melalui konstitusi juga turut menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tetapi kaidah tidak selalu berjalan sesuai yang dicita-citakan, hal tersebut dapat dilihat dari PT Sukses Hasil Alam Nusaindo yang tidak membayar hak upah pasca pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian *das sollen* dengan *das sein* sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kaidah hukum hak upah pekerja bila terjadi pemutusan hubungan kerja akibat *force majeure* dan mekanisme penyelesaiannya serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap upah proses yang digugat oleh pekerja selama pemutusan hubungan kerja berlangsung. Penelitian yang dikaji bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi berupa analisis deskriptif. Pengambilan data serta informasi dilakukan dengan studi kepustakaan, pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pekerja tetap memiliki hak atas upah selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 155 UU Tenaker *jo.* Pasal 157A UU CK. Penyelesaian perselisihan berawal dengan adanya pertemuan dua pihak, tripartit, dan terakhir melalui putusan pengadilan negeri dan putusan kasasi. Dalam pertimbangan hakim mengenai upah proses dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks menunjukkan adanya ketidaksesuaian karena tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum yang ada.

Kata Kunci: Hak upah, Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja

ABSTRACT

*As a country of law, Indonesia places law as the main norm that regulates social and state life with the aim of creating justice and prosperity for society, one of which concerns the right to wages of a worker. Wages are essential for workers considering that workers have put in their time and energy to meet their living needs and the State through the constitution also guarantees that everyone has the right to work and a decent living. However, the rules do not always work as intended, this can be seen from PT Sukses Produk Alam Nusaindo which does not pay wages after termination of employment. This gives rise to a discrepancy between *das sollen* and *das sein*, so the author wants to examine in more depth the legal rules regarding workers' wage rights in the event of termination of employment due to force majeure and the settlement mechanism as well as how the judge considers the processing wages claimed by workers during the termination of employment. The research studied is normative juridical in nature with specifications in the form of descriptive analysis. Data and information collection was carried out using literature studies, a research approach using a statutory approach, and analyzing data using qualitative techniques. The results of the research illustrate that workers still have the right to wages as long as the resolution of industrial relations disputes takes place as regulated in Article 155 of the Employment Law jo. Article 157A of the CK Law. Dispute resolution starts from bipartite, tripartite negotiations, through district court decisions and supreme court decisions. In the judge's consideration regarding processing wages in the Makassar District Court Decision Number 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks shows that there is a discrepancy because it does not fully refer to the applicable laws and regulations.*

Keywords: Wage Rights, Termination of Employment, Workers

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak Upah Pekerja PKWTT Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Alasan Force Majeure (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang bersedia membimbing dan meluangkan waktu dalam memberikan ilmu-ilmu untuk pengerjaan skripsi penulis;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan wawasan serta ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Papa dan Mama penulis yang telah memberikan dukungan serta membiayai uang kuliah selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Teman-teman seperjuangan dari Tanjungpinang, Sylvia Shasmita, Marvin Candra, Clara Amanda, Rifaldo Hardion, Angie, Anlyn, Sharon Jess, dan Denis Syahputra

8. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu, Talitha Marshanda, Zahra Alsabila, Deryl Leeland, Evelyn, Chakradevi, Raden Ajeng Diah Puspasari, Lavienda William, Angelin Zefanya, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
9. Kakak tingkat yang telah mendukung serta membantu penulis, Bella Christine, Alfredo Juniotama Arifin, Michellie Chandra Wijaya dan Novianti Lestari;
10. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan yang telah diberikan.

Jakarta, 26 November 2024

Felix Furguson

Pernyataan

Nama

NIM

Program Studi

Judul

**Dengan ini menyatakan
bawah bimbingan T**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Hak Upah.....	23
B. Hubungan Kerja.....	28
C. Perjanjian Kerja.....	31
D. Pemutusan Hubungan Kerja.....	43
E. Force Majeure.....	53
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	57
A. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks.....	57
1. Profil Para Pihak.....	57

2. Kasus Posisi.....	58
3. Pembuktian.....	62
4. Pertimbangan Hukum.....	64
5. Putusan Hakim.....	68
B. Putusan Pengadilan Relevan.....	69
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 866/K/Pdt.Sus-PHI/2021.....	69
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 866/K/Pdt.Sus-PHI/2021.....	72
Bab IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	74
A. Kaidah Hukum Dari Hak Upah Terhadap Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan <i>Force Majeure</i>.....	74
B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Akibat Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.....	82
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Upah Proses Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Phi/2024/Pn.Mks).....	87
Bab V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
DAFTAR LAMPIRAN.....	103

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Konseptual.....	15
---------	--------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perhitungan Hak Upah Penggugat 1 berdasarkan Surat Gugatan.....	60
Tabel 3.2	Perhitungan Hak Upah Penggugat 2 berdasarkan Surat Gugatan.....	61
Tabel 3.3	Keterangan Saksi.....	64
Tabel 3.4	Perhitungan Hak Upah Penggugat berdasarkan Undang-Undang.....	67
Tabel 3.5	Perhitungan Hak Upah Penggugat 1.....	67
Tabel 3.6	Perhitungan Hak Upah Penggugat 2.....	67
Tabel 4.1	Perhitungan Hak Upah Penggugat berdasarkan Undang-Undang.....	79

DAFTAR SINGKATAN

UUD	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
UU Tenaker	Undang-Undang Ketenagakerjaan
UU CK	Undang-Undang Cipta Kerja
UU PPHI	Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	:	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	:	Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	:	Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	:	Letter of Acceptance (LOA) Sinta 4
Lampiran 9	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 10	:	Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks